



Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Islam

Nidia Suriani¹, Su'aidi², Minnah El Widdah³,
Universitas Jambi¹ UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi²⁻³,
Email Korespondensi: nidnods.ns@gmail.com¹,

*Article received: 23 Oktober 2023, Review process: 03 November 2023,
Article Accepted: 15 Desember 2023, Article published: 01 Januari 2024*

ABSTRACT

Policy is a guiding direction in making a decision. The method in this research uses a library research approach. In this study there was no research location, because all data was taken from journals, books and scientific proceedings. The data collection technique in this research uses documentation, with data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research can be described that educational policy recommendations must outline the vision and mission of national education to realize the achievement of national education goals. Education policies are determined within a certain period of time and can be changed or replaced according to current conditions and needs. Education policy is formulated through a political process to determine strategic plans or steps in providing education. Determining education policy plans must also link them to the education budget. Because the education budget really determines the level of efficiency and effectiveness of implementing an education policy.

Keywords: *Islamic Education Policy.*

ABSTRAK

Kebijakan merupakan arah pedoman dalam pengambilan sebuah keputusan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pada penelitian ini tidak terdapat lokasi penelitian, karena seluruh data diambil dari jurnal, buku, dan proseding ilmiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat dideskripsikan bahwa rekomendasi kebijakan pendidikan harus menjabarkan visi dan misi pendidikan nasional untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dan dapat diubah atau diganti sesuai dengan keadaan zaman serta kebutuhan. Kebijakan pendidikan dirumuskan melalui proses politik untuk menentukan rencana-rencana atau langkah-langkah strategis dalam menyelenggarakan pendidikan. Menentukan rencana-rencana kebijakan pendidikan harus juga mengkaitkannya dengan anggaran pendidikan. Sebab anggaran pendidikan sangat menentukan tingkat efisien dan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan pendidikan

Kata Kunci: *Kebijakan Pendidikan Islam.*

PENDAHULUAN

Terminologi pendidikan Islam merujuk pada konteks makna institusi, proses dan kurikulum. Institusi akan merujuk pada lembaga-lembaga pendidikan Islam formal maupun non-formal (Muhammad, 2014). Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menjawab problematika yang terjadi di masyarakat. Selain menjadi pusat studi ilmu-ilmu keislaman, pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk menjembatani munculnya berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat, terutama yang bersinggungan dengan nuansa paham keagamaan. Di tengah-tengah status sosial kemasyarakatan yang beragam latar belakang, pendidikan Islam masih dihadapkan dengan munculnya sentimental paham keagamaan yang dipicu oleh perbedaan cara pandang dalam memahami agama. Pada saat tertentu, nuansa paham keagamaan akan mengarah pada konflik horizontal yang meluas ketika institusi keagamaan tidak mampu menjembatani berbagai paham keagamaan yang terjadi, terutama pada sebagian kelompok masyarakat yang cenderung kurang memahami realitas perbedaan dan sempit wawasan pemahaman keagamaannya (Aceng et al., 2019).

Secara konseptual pendidikan Islam barangkali telah menjelma menjadi *normal science* yang mapan, *established*, dan bebas dari kritik. Jika pendidikan Islam telah memperluas cakupan diskursusnya maka harapan untuk terjadinya paradigma shift sulit untuk diwujudkan. Pendidikan Islam yang hanya menekankan dimensi normatif-teologis juga tidak akan banyak memberikan kontribusi dalam memecahkan persoalan-persoalan empiris-sosiologis yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kontemporer (Tabrani.ZA, 2014).

Pendidikan Islam merupakan usaha dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim (Abdul, 2022). Tujuan pendidikan agama Islam dalam konsep tauhid menurut pemikiran Abdul Karim Amrullah adalah untuk menyiapkan manusia menjadi beriman kepada Allah, bertakwa, dan memiliki tanggung jawab, serta berakhlak mulia. Adapun pendidikan iman (tauhid) yang dimaksud adalah mendidik anak sebagaimana yang terkandung dalam rukun Islam, rukun iman, dan dasar syari'ah, mulai anak mampu memahami dan mampu membedakan baik dan buruk dasar-dasar iman adalah meyakini dan mengamalkan isi kandungan dari rukun iman tersebut. Sedangkan orang Islam yang dikatakan sempurna keislamannya bila melaksanakan rukun Islam dengan baik, serta mengamalkan dasar-dasar syariat sesuai jalan ilahi dan ajaran Islam, seperti aqidah, ibadah, akhlak, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku (Fitriani et al., 2023).

Kebijakan mengenai pendidikan islam tentunya juga mengandung beberapa aspek di dalamnya yang bersifat konstruktif agar pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan diselenggarakannya pendidikan tersebut (Mohammad, 2019). Kebijakan madrasah berusaha mengakomodasikan 3 kepentingan yaitu; (1) sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keislaman, (2) memperjelas atau

memperkokoh keberadaan madrasah sederajat dengan sistem sekolah sebagai wahana pembinaan warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian serta produktif, (3) mampu merespon tuntutan- tuntutan masa depan, dalam arti sanggup melahirkan manusia yang memiliki kesiapan memasuki era globalisasi maupun era reformasi (Alisyah et al., 2022).

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin melihat dan memahami lebih jauh tentang rekomendasi kebijakan pendidikan islam, dengan tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan pendidikan islam. Dengan harapan hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat bagi dunia pendidikan islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelusuran dan penelitian dengan metode membaca dan menelaah berbagai jurnal, buku, dan berbagai naskah terbitan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian dalam menghasilkan sebuah tulisan yang berkenaan dengan suatu topik penelitian. Pada penelitian ini tidak terdapat lokasi penelitian, karena seluruh data diambil dari jurnal, buku, dan prosiding ilmiah. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah rekomendasi kebijakan pendidikan islam, dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dengan melakukan literature review pada buku, artikel jurnal ilmiah dan beberapa kajian ilmiah yang berkaitan dengan rekomendasi kebijakan pendidikan islam, dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan berasal dari kata bijak yang mengandung arti; pertama, kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; kedua, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai gari pedoman untuk mencapai sasaran dan atau garis haluan (Mukti, 2019). Kebijakan dalam bahasa Inggris policy yang dibedakan dari kata wisdom yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku daripada organisasi. Menurut "Kebijakan merupakan garis pedoman untuk pengambilan keputusan". Kebijakan merupakan sesuatu yang bermanfaat dan juga merupakan penyederhanaan system yang dapat membantu dan mengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu, oleh sebab itu suatu kebijakan dianggap sangat penting (Sumarto, 2017).

Menurut Lasswell dikutip Muh. Abdul Mukti, kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (a projected program of goals values and practices). Berikutnya menurut Anderson dikutip Muh. Abdul Mukti, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya

untuk memecahkan suatu masalah (a purposive course of problem or matter of concern). Selanjutnya menurut Friedrik dikutip Muh. Abdul Mukti, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan (Mukti, 2019).

Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit (Mukti, 2019).

Kebijakan merupakan tindakan politik yang dilakukan secara sengaja dengan pemikiran matang dan hati-hati oleh sejumlah pejabat, organisasi, dan instansi pemerintah untuk memecahkan masalah dan menghasilkan keputusan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, Kebijakan adalah suatu proses menjalankan satu alternative kebijakan yang telah diputuskan dari beberapa alternatif kebijakan yang dirancang sebelumnya. Semua bidang kehidupan mempunyai kebijakannya masing-masing untuk dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak dan pembatasan perilaku, sehingga mempunyai arah yang jelas dalam melangkah ke masa depan. Kebijakan tersebut tidak terkecuali juga ada pada bidang pendidikan Islam yang sering disebut dengan kebijakan pendidikan (Islamic educational policy) (Rohman & Anis, 2023). Kebijakan pendidikan Islam dilatarbelakangi oleh adanya masalah dalam bidang pendidikan. Masalah kebijakan pendidikan Islam muncul ketika adanya kesenjangan antara tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan kenyataan penyelenggaraan pendidikan. H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan proses perumusan langkah-langkah strategis penyelenggaraan pendidikan dengan menjabarkan visi dan misi pendidikan guna mencapai terwujudnya tujuan pendidikan yang dibuat dalam kurun waktu tertentu. Margaret Goertz dikutip Rohman dan Anis Fauzi, mengatakan bahwa kebijakan pendidikan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan (Rohman & Anis, 2023).

Rohman dan Anis Fauzi, merumuskan kebijakan pendidikan harus menjabarkan visi dan misi pendidikan nasional untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dan dapat diubah atau diganti sesuai dengan keadaan zaman serta kebutuhan. Kebijakan pendidikan dirumuskan melalui proses politik untuk menentukan rencana-rencana atau langkah-langkah strategis dalam menyelenggarakan pendidikan. Menentukan rencana-rencana kebijakan pendidikan harus juga mengkaitkannya dengan anggaran pendidikan. Sebab

anggaran pendidikan sangat menentukan tingkat efisien dan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan pendidikan (Rohman & Anis, 2023).

Charles O. Jones dikutip Rohman dan Anis Fauzi, mengemukakan sebuah kebijakan pendidikan mencakup lima komponen, yaitu; (1) Tujuan (goal) Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok dalam jangka waktu tertentu. Tujuan biasanya dibuat sebagai langkah awal dalam pembuatan suatu rencana kegiatan atau program. Dalam suatu kegiatan dibutuhkan juga tujuan sebagai salah satu komponennya. Kebijakan pendidikan yang akan diimplementasikan harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan dalam kebijakan pendidikan juga harus rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. (2) Rencana (plans) Setelah menentukan tujuan kebijakan pendidikan yang ingin dicapai, selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat rencana kerja yang memuat secara spesifik operasional kerja yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Rencana kerja dibuat untuk mengatur manajemen kerja dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pendidikan sehingga arah pelaksana kebijakannya jelas dan terarah. (3) Program (programme) Langkah ketiga adalah pembuatan program. Program merupakan proyek nyata dari tujuan yang telah disusun sebelumnya. Program dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai sebuah tujuan dengan melihat tingkat keberhasilan dan kegagalan. Program yang dimaksudkan disini adalah kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi bidang pendidikan. Dalam membuat suatu kebijakan pendidikan sebaiknya dibuat lebih dari satu atau dengan membuat beberapa pilihan alternatif kebijakan pendidikan agar nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan. (4) Keputusan (Decision) Keputusan (decision) adalah segenap tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana program, melaksanakan program dan mengevaluasi program. Keputusan diambil dengan memperhatikan hasil ujicoba dari beberapa alternatif kebijakan pendidikan yang telah dilakukan. Hasil rasionalitas, tingkat kepuasan dan dapat diterimanyakebijakan pendidikan oleh semua pihak menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan kebijakan pendidikan untuk ditetapkan dan diimplementasikan. (5) Dampak (effects) Dampak (effects) merupakan dampak dari program yang telah dilaksanakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik program primer maupun sekunder. Dalam penetapan suatu kebijakan pendidikan tidak dipungkiran pasti akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Kelima komponen di atas digunakan untuk mewujudkan terjadinya suatu kebijakan. Tanpa kelima komponen tersebut suatu kebijakan tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Kelima komponen saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain untuk mendukung pembuatan suatu kebijakan khusus kebijakan dalam bidang pendidikan (Rohman & Anis, 2023).

Analisis kebijakan perlu memiliki kecakapan-kecakapan sebagai berikut; (1) mampu cepat mengambil fokus pada kriteria keputusan yang paling sentral. (2) mempunyai kemampuan analisis multi-disiplin, jika pun tidak, mampu mengakses kepada sumber pengetahuan di luar disiplin yang dikuasainya. (3)

mampu memikirkan jenis-jenis tindakan kebijakan yang dapat diambil. (4) mampu menghindari pendekatan toolbox (atau textbook) untuk menganalisis kebijakan, melainkan mampu menggunakan metode yang paling sederhana namun tepat dan menggunakan logika untuk mendesain metode jika metode yang dikehendaki memang tidak tersedia. (5) mampu mengatasi ketidakpastian dan mampu mengemukakan dengan angka. (6) mampu membuat rumusan masalah yang sederhana namun jelas, memeriksa fakta-fakta yang diperlukan, meletakkan diri pada posisi orang lain (empati), khususnya sebagai pengambil kebijakan dan publik yang menjadi konstituennya dan mampu untuk menahan diri hanya untuk memberikan analisis kebijakan, bukan keputusan. (7) mampu tidak saja mengatakan “ya” atau “tidak” pada usulan yang masuk, namun juga mampu memberikan definisi dan analisa dari usulan tersebut, mampu menyadari bahwa tidak ada kebijakan yang sama sekali benar, sama sekali rasional dan sama sekali komplit. 8. Mampu memahami bahwa ada batas-batas intervensi kebijakan public dan mempunyai etika profesi yang tinggi.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan

George C. Edwards III dikutip Erisa Nada Dewant dkk, Ada beberapa faktor yang berpengaruh pada kebijakan pendidikan diantaranya; (a) Komunikasi, Komunikasi harus dilakukan secara jelas dan terperinci agar tidak terdapat perbedaan interpretasi atau kesalahan komunikasi. Artinya, penerapan kebijakan tersebut harus bisa diterima oleh seluruh pegawai dan harus memiliki pemahaman yang jelas dan akurat tentang maksud dan tujuan kebijakan tersebut. Ada tiga hal yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan aspek komunikasi yakni transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik, kejelasan informasi, dan onsistensi dalam menyampaikan informasi. (b) Sumber Daya, Sumber daya yang dimaksud antara lain jumlah anggota, keahlian pelaksana, informasi relevan yang memadai untuk melaksanakan kebijakan, kewenangan mengelola program sejalan dengan yang diharapkan, dan adanya fasilitas pendukung, yaitu sumber daya manusia. Hal tersebut diperuntukan dalam melaksanakan kegiatan program seperti pembiayaan dan infrastruktur. Bakat yang tidak memadai mempengaruhi penyampaian program yang tidak memadai. Untuk itu diperlukan manajemen talenta yang baik untuk meningkatkan kinerja program. Bagian urgen lainnya yaitu pengadaan kantor, peralatan, dana yang cukup, dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan/program tersebut. (c) Disposisi, Disposisi berarti watak dan kualitas pelaksana, Yaitu mencakup komitmen, kejujuran, hakikat demokrasi. Ada tiga bentuk sikap/reaksi terhadap suatu kebijakan. Artinya, arah/arahan pelaksana menanggapi program terhadap persepsi pelaksana, penerimaan atau penolakan, dan kekuatan tanggapan. Pelaksana mungkin memahami maksud dan tujuan program, tetapi tidak dapat melaksanakan program dengan baik karena menolak tujuan yang terkandung dalam program, meninggalkan peluang untuk mengganggu dan menghindari pelaksanaan program. Dalam proses tercapainya tujuan suatu program, seperti kepemimpinan, membutuhkan banyak dukungan

eksekutif, karena memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan program untuk mencapainya secara efektif dan efisien. (d) Struktur, Struktur organisasi birokrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan memegang peranan penting. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek penting dari sebuah organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman tindakan (Erisa et al., 2022).

Dalam ungkapan lain menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan islam yakni; (1) Faktor Agama, dalam proses pembudayaan manusia, keberadaan pendidikan mutlak diperlukan. Bukan saja karena ia merupakan produk sejarah dan masyarakat, melainkan juga karena peranannya yang asasi dalam pembentukan hari depan. Di atas peranannya ini terletak tugas dan tanggung jawab kultural edukatif terhadap anak didik dan masyarakat. Dalam perjalanan sejarahnya, sebuah kegiatan pendidikan ditentukan oleh visi, misi dan sifat yang melatar belakangnya. Dalam berbagai referensi kita masih belum menjumpai rumusan tentang visi, misi dan sifat pendidikan Islam tersebut secara eksplisit. Yang ada pada umumnya adalah rumusan tentang tujuan, kurikulum, metode belajar mengajar, kriteria guru dan berbagai aspek pendidikan lainnya. Rumusan tentang visi, misi dan sifat pendidikan Islam yang demikian penting itu belum sempat terpikirkan, walaupun berbagai isyarat di dalam al-Qur'an, al-Hadits dan berbagai sumber ajaran Islam lainnya, rumusan tentang visi, misi dan sifat pendidikan Islam tersebut dapat dirumuskan. (2) Faktor Ideologi Negara, antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hal ini dapat ditelusuri dari dua segi: Pertama, dari konsep penyusunan sistem pendidikan nasional Indonesia itu sendiri. Kedua, dari hakikat pendidikan Islam dalam kehidupan beragama kaum muslimin di Indonesia. (3) faktor perkembangan masyarakat, perkembangan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya mau tidak mau akan menuju kepada masyarakat informasi (informatical society) sebagai kelanjutan atau perkembangan dari masyarakat industri atau modern. Jika masyarakat modern memiliki ciri-ciri rasional, berorientasi ke depan, bersikap terbuka, menghargai waktu, kreatif, mandiri dan inovatif, maka pada masyarakat informasi ciri-ciri tersebut belum cukup. Pada masyarakat informasi, manusia selain harus memiliki ciri-ciri masyarakat modern pada umumnya, juga harus memiliki ciri-ciri lain, yaitu menguasai dan mampu mendaya gunakan arus informasi, mampu bersaing, terus menerus belajar (serba ingin tahu), mampu menjelaskan, imajinatif, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, dan menguasai kemampuan menggunakan berbagai metode dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. (4) Faktor perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dalam tiga dasawarsa ini telah menampakkan pengaruhnya pada setiap dan semua kehidupan individu, masyarakat dan negara. Dapat dikatakan bahwa tidak ada

orang yang dapat menghindar dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), IPTEK bukan saja dirasakan individu, akan tetapi dirasakan pula oleh masyarakat, bangsa dan negara (Eka, 2017).

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan rekomendasi kebijakan pendidikan islam dapat dideskripsikan bahwa rekomendasi kebijakan pendidikan harus menjabarkan visi dan misi pendidikan nasional untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dan dapat diubah atau diganti sesuai dengan keadaan zaman serta kebutuhan. Kebijakan pendidikan dirumuskan melalui proses politik untuk menentukan rencana-rencana atau langkah-langkah strategis dalam menyelenggarakan pendidikan. Menentukan rencana-rencana kebijakan pendidikan harus juga mengkaitkannya dengan anggaran pendidikan. Sebab anggaran pendidikan sangat menentukan tingkat efisien dan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, W. (2022). Eksistensi dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Kolonial Belanda. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 4613.
- Aceng, A. A., Anis, M., A.Khoirul, A., Ali, M., Idris, M., & Masduki, D. (2019). *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Alisyah, P., Hapzi, A., & Kasful, A. U. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDIDIKAN ISLAM: PARADIGMA, BERPIKIR KESISTEMAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH (LITERATURE REVIEW MANAJEMEN PENDIDIKAN). *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 2(1), 274.
- Eka, P. D. (2017). Analisis Kebijakan Pendidikan mengenai Pengembangan dan Peningkatan Profesi Guru. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(2), 162. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jpp.v17i2.8251>
- Erisa, N. D., Farid, S., Majelis, R. T., & Pemi, E. (2022). Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia. *ANWARUL: Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 2(4), 316.
- Fitriani, Hasan, B., & Ujang, D. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045. *Journal Education and Development*, 11(2), 155.
- Mohammad, A. Y. S. (2019). Penerapan Kebijakan Dalam Pendidikan Islam (Studi Bentuk-Bentuk Analisis Kebijakan). *Jurnal TAMADUN*, 20(1), 29.
- Muhammad, I. (2014). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam. *EL-TARBAWI*, 7(1), 56.
- Mukti, M. A. (2019). Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Kependidikan*

dan Keagamaan, 3(2), 419.

Rohman, & Anis, F. (2023). Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Islam. *Jurnal Indopedia (Inovasi Pembelajaran dan Pendidikan)*, 1(2), 253.

Sumarto. (2017). Perkembangan Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *THAQAFIYYAT*, 18(1), 109.

Tabrani.ZA. (2014). Isu-Isu Kritis Dalam Pendidikan Islam (Perspektif Pedagogik Kritis). *Jurnal Ilmiah Peuredum*, 1(3), 46.